PENELITIAN PENGEMBANGAN

KOMODITAS/PRODUK/JENIS USAHA UNGGULAN UMKM

KABUPATEN LUMAJANG

2013



Kerja sama

Universitas Negeri Malang dengan Bank Indonesia

PENELITIAN PENGEMBANGAN KOMODITAS/PRODUK/JENIS USAHA UNGGULAN UMKM KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN HASIL PENELITIAN

KERJASAMA

BANK INDONESIA

DAN

TIM PENELITI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

MALANG
2013

RINGKASAN

PENELITIAN PENGEMBANGAN KPJU UMKM KABUPATEN LUMAJANG

2013

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran penting dan strategis, tercermin dari berbagai data yang mendukung eksistensi UMKM dalam perekonomian Indonesia cukup dominan menghadapi krisis. Data Kementrian Negara Koperasi& UKM tahun 2011 menyebutkan bahwa jumlah industri UMKM terdapat dalam setiap sector ekonomi dan tercatat sebanyak 51,3 juta unit atau setara 99,91% dari total usaha. UMKM berpotensi besar menyerap tenaga kerja sebesar 97,04% dari total angkatan kerja yang bekerja. Kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB sebesar 55,56 % dari total PDB.

Bank Indonesia dalam rangka mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM melakukan penelitian tentang UMKM yang dapat dipergunakan sebagai informasi untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan memperoleh KPJU Unggulan maupun potensial untuk kepentingan*stakeholders*, baik pemerintah daerah, perbankan, kalangan swasta, maupun masyarakat luas dalam upaya pemberdayaan UMKM.

Penelitian KPJU dimaksudkan untuk mengenal dan memahami profil daerah, profil UMKM, kebijakan Pemerintah dan peranan Perbankan dalam pengembangan UMKM, memberikan informasi tentang KPJU unggulan, memberikan informasi permasalahan yang timbul dari masing-masing KPJU unggulan, KPJU potensial, memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan pihak perbankan dalam rangka pengembangan KPJU unggulan.

Penelitian KPJU dilaksanakan di 21 kecamatan di Kabupaten Lumajang. Berdasarkan hasil penelitian KPJU ditemukan lima KPJU Unggulan, lima KPJU potensial dan permasalahan yang dihadapi oleh KPJU Unggulan sebagai berikut:

KOMODITAS UNGGULAN
KABUPATEN LUMAJANG
Pisang
Padi
Jagung
Aneka Keripik
Pasir

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI KAB LUMAJANG

PRODUK	PISANG	PADI	JAGUNG	ANEKA KERIPIK	PASIR
MASALAH YANG DIHADAPI	• Permodalan	• Ketergantungan petani dalam penggunaan pestisida kimia	• Ketersediaan pupuk yang tidak tepat dengan kebutuhan • hama	• Permodalan	• Para penambang liar • Perijinan

KOMODITAS POTENSIAL KABUPATEN LUMAJANG
Tebu
Olahan kayu
Sengon
Kambing Ettawa
tembakau

Rekomendasi Kebijakan

KAB LUMAJANG
• Bantuan bibit untuk para petani dan bantuan modal dari dinas terkait • Pelatihan dari dinas pertanian. • Pengadaan Sekolah lapang • Demplot • PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) • Pelatihan pengolahan jagung • Program pengembangan sentra-sentra industri • Memfasilitasi bantuan program sentra-sentra industri • Pengembangan desa binaan industri kecil dan menengah • Memfasilitasi pemasaran melalui pameran dan pasar lelang daerah • Kemudahan dalam pengurusan perijinan bagi penambang • Revitalsasi pabrik gula yang ada di kabupaten Lumajang • Mensosialisasi untuk perizinan bagi olahan kayu non formal • Pemberian kebijakan tebang butuh. • Pemberian dana dari pemerintah pusat • Pembinaan bagi peternak • Kemudahan dalam pemasaran produk baik susu maupun kambing. • Membantu meningkatkan produksi • Pengadaan dana bergulir dengan bunga 0%
PERAN PERBANKAN
• Dalam mendorong pertumbuhan UMKM, bank menyalurkan kredit UMKM antara lain Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, Kredit Usaha Pembibitan Sapi, Kredit Usaha Rakyat, Kredit Usaha Mikro, Kredit Modal Kerja • Perbankan diharapkan dapat meningkatkan kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi produk perbankan bagi UMKM dan meningkatkan komunikasi dan sumber informasi

PERAN PEMERINTAH

- Kebijakan pemerintah seharusnya lebih banyak dikoordinasikan antar sektor di kelima kota/kab agar dapat terjalin hubungan baik antar sektor
- Melakukan koordinasi guna memperoleh solusi permasalahan dalam upaya meningkatkan potensi dan prospek UMKM sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN i

EXECUTIVE SUMMARY iv

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI. vii

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR TABEL x

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Penelitian 3
1.3 Ruang Lingkup Penelitian 4
1.4 Hasil yang Diharapkan 4

BAB II METODOLOGI 6

2.1 Daerah Penelitian 6
2.2 Jenis dan Sumber Data 6
2.3 Teknik Pengumpulan Data 6
2.4 Analisis Data 7
2.5 Penentuan KPJU Tingkat Kecamatan 8
2.6 Penentuan KPJU Tingkat Kabupaten/Kota 8

BAB III TINJAUAN WILAYAH 10

BAB IV HASIL PENELITIAN 11

4.1 Penetapan KPJU Unggulan Kecamatan 11
4.2 Penetapan KPJU Unggulan Kota/Kabupaten 11
4.3 Penetapan KPJU Unggulan dan Potensial Kota/Kab. 13

BAB V PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN 16

5.1 KPJU Unggulan di Kabupaten Lumajang 16
5.2 Peranan Perbankan Dalam Pengembangan UMKM 20
5.3. Analisis SWOT Tiap Sektor Di Masing-masing Kota 21
5.4. Potensi dan Prospek KPJU Potensial Serta Kebijakan Untuk Mendukung KPJU Potensial 22

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 25

6.1 Kesimpulan 25
6.2 Rekomendasi Kebijakan 26

DAFTAR PUSTAKA 28

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran penting dan strategis, tercermin dari berbagai data yang mendukung eksistensi UMKM dalam menghadapi krisis ekonomi Indonesia. Data dari Kementrian Negara Koperasi & UKM tahun 2011 menyebutkan bahwa jumlah industri UMKM terdapat dalam setiap sektor ekonomi dan tercatat sebanyak 51,3 juta unit atau setara 99,91% dari total usaha. UMKM berpotensi besar dalam menyerap tenaga kerjasebesar97,04% dari total angkatan kerja yang bekerja. Kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB sebesar 55,56 % dari total PDB.

Dalam rangka mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM, Bank Indonesia memiliki kebijakan dari sisi permintaan (*Demand Side*) dan penawaran (*Supply Side*). Kebijakan *Demand Side*merupakan kebijakan yang diarahkan untuk mendorong UMKM agar mampu meningkatkan eligibilitas dan kapabilitasnya sehingga *bankable* yang meliputi penelitian, pelatihan, penyediaan informasi dan kerjasama dengan lembaga internasional dan Pemerintah. Kebijakan *Supply Side*merupakan kebijakan yang difokuskan pada berbagai kebijakan dan program untuk membantu bank dalam menyalurkan kredit kepada UMKM yang meliputi pengaturan kepada perbankan,penguatan kelembagaan dan penyediaan dana secara tidak langsung melalui penerbitan SUP No.005 dan dana *relending*. Kebijakan dari sisi permintaan berupa penelitian dimaksudkan dalam rangka pemberian informasi yang dapat digunakan dalam mendorong pertumbuhan UMKM, informasi kepada*stakeholders*, baik kepada pemerintah daerah, perbankan, kalangan swasta,dan masyarakat luas.

Bank Indonesia sejak lama mengembangkan penelitian *Baseline Economic Survey* (BLS) yang bertujuan mengidentifikasi berbagai peluang investasi di daerah yang bermuara pada pemberian informasi potensi ekonomi suatu daerah. Dalam perkembangannya, sejak tahun 2006,

penelitian BLS lebih diarahkan kepada penelitian pengembangan potensi ekonomi daerahyang memberikan informasi kepada *stakeholders* mengenai Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) potensial untuk menjadi unggulan daerah yang dapat dikembangkan terutama terhadap UMKM yang merupakan pelaku ekonomi mayoritas di daerah.

Data dan informasi dalam Penelitian Pengembangan KPJU Unggulan UMKM meliputi aspek makro berupa kebijakan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan potensi ekonomi daerah dalam rangka pengembangan UMKM. Sementara pada aspek mikro, meliputi kondisi dan potensi UMKM. Hasil penelitian tersebut akan didiseminasikan dalam *website* Sistem Informasi Terpadu Pengembangan UKM (SI-PUK) yang terintegrasi dalam Data dan Informasi Bisnis Indonesia (DIBI), dan dapat diakses melalui internet di alamat **www.bi.go.id**.

Metode Penelitian Pengembangan KPJU UMKM Bank Indonesia menggunakanMetode *Analytic Hierarchy Process*(AHP) yang dimodifikasi. Dalam menetapkan KPJU unggulan kecamatan dan kabupaten/kotamenggunakan Metode Bayes dan Metode Borda. Dari hasil penelitian tersebut, tiap kabupaten/kota di suatu provinsi memiliki KPJU unggulan dari berbagai sektor ekonomi untuk dikembangkan yang dapat dilihat dari beberapa perspektif:

a. Perspektif *Product Life Cycle* (PLC)

   KPJU disebut unggulan dengan melihat tahap kematangan KPJU, dalam tahap *mature* karena saat ini unggul dibanding KPJU yang lain (meskipun kemungkinan besar akan mengalami *decline* setelah melewati fase *mature*), atau saat ini tidak terlalu unggul namun berpotensi besar unggul di masa depan (*fase growth*) yang dapat menimbulkan konsekuensi pada perspektif strategi pengembangan.

b. Perspektif Tujuan

   Dalam perspektif tujuan, penentuan KPJU unggulan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atau tujuan atau target yang ingin dicapai, dengan meyakinkan investoragar berinvestasi pada bisnis KPJU unggulan yang terpilih dengan jaminan *return* yang cepat, atau dengan

memberikan stimulus bagi usaha lemah namun berpotensi unggul di masa datang.

c. Perspektif Keberpihakan

Pemilihan KPJU unggulan dengan melibatkan unsur keberpihakan, pada pengusaha lokal.

d. Perspektif Skenario Kebijakan

KPJU disebut unggulan dengan melihat dari kondisi saat ini (*existing*) KPJU unggul dibanding dengan yang lain tanpa melihat ada kontradiksi dengan skenario kebijakan pemerintah normatif.

Berdasarkan keempat perspektif di atas, penelitian KPJU akan lebih fokus, sehingga Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan kebijakan ekonomi melalui pengembangan KPJU unggulan di suatu kabupaten/kota sebagai upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengurangi angka/tingkat kemiskinan di daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

1.2. Tujuan Penelitian

a. Mengenal dan memahami mengenai:
   1) Profil daerah, meliputi: kondisi geografis, demografi, perekonomian dan potensi sumberdaya.
   2) Profil UMKM di wilayah penelitian termasuk faktor pendorong dan penghambat dalam pengembangan UMKM.
   3) Kebijakan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Daerah Tingkat I dan II) yang terkait dengan pengembangan UMKM.
   4) Peranan Perbankan dalam pengembangan UMKM.

b. Memberikan informasi tentang KPJU unggulan yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan di suatu kabupaten/ kota dan kecamatan dalam rangka:
   1) Mendukung pembangunan ekonomi daerah;
   2) Menciptakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja

3) Meningkatkan daya saing produk.

c. Memberikan informasi dan permasalahan yang timbul dari masing-masing KPJU unggulan lintas sektoral di masing-masing kabupaten/kota, misalnya mengenai bahan baku, tenaga kerja, teknologi yang digunakan, produksi, kondisi permintaan, harga dan lokasi (kecamatan).

d. Memberikan informasi tentang KPJU potensial, yaitu KPJU yang saat ini belum menjadi unggulan namun memiliki potensi untuk menjadi unggul di masa datang apabila mendapatkan perlakuan atau kebijakan tertentu.

e. Memberikan rekomendasi berupa:
   1) KPJU unggulan yang perlu/dapat dikembangkan di masing-masing kabupaten/kota
   2) Peranan Perbankan dalam pengembangan KPJU unggulan
   3) Kebijakan kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota), yang dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dalam rangka pengembangan KPJU unggulan UMKM.

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

a. UMKM dengan kategori sebagai unggulan daerah pada tingkat kabupaten/kota.

b. UMKM sebagaimana disebutkan dalam UU No.20 Tahun 2008
   1) Usaha Mikro
   2) Usaha Kecil
   3) Usaha Menengah

c. Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) unggulanyang mendukung perekonomian daerah antara lain:
   1) mampu menciptakan dan menyerap tenaga kerja
   2) mempunyai prospek yang baik
   3) berdaya saing tinggi.

4) Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Potensial lintas sektoral yang tidak masuk lima besar di tingkat kabupaten/kota yang dapat menjadi KPJU

unggulan apabila ada perlakuan atau kebijakan tertentu denganpenjelasan kelemahannya agar dapat diformulasikan perlakuan tertentu atau kebijakan yang perlu diambil agar KPJU potensial tersebut dapat berkembang menjadi KPJU unggulan.

5) KPJU pada setiap sektor/subsektor ekonomi, yang meliputi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan), pertambangan dan penggalian, perindustrian, perdagangan dan jasa-jasa

6) KPJU sampai dengan nama KPJU akhir(misalnya: padi sawah, kacang hijau, angkutan perkotaan).

1.4. Hasil yang Diharapkan

a. Laporan Hasil Penelitian KPJU unggulan di KabupatenLumajang. Terjalinnya kerjasama multipihak dalam mendorong peningkatan usaha yang termasuk dalam KPJU unggulan di Kabupaten/Kota.

b. Menjadikan laporan KPJU unggulan Kabupaten/Kota sebagai salah satu input dalam proses penyusunan rencana dan pengambilan kebijakan serta program pembangunan di Kabupaten/Kota.